



**P E N E T A P A N**

**Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

N a m a : PEMOHON I.  
Tempat,tgl.,lahir : Cianjur, 15 Mei 1976 (45 tahun), Islam  
NIK : XXXXXXXX  
No WA : -  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,  
Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**.

N a m a : PEMOHON II .  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 01 Juni 1984 (37 tahun), agama  
NIK : Islam  
No WA : XXXXXXXXX  
-  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,  
selanjutnya sebagai disebut **PEMOHON II**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Juni 2021

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 3 Juni 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a	:	XXXXXXXXXX
Tempat,tanggal,lahir	:	Jakarta, 08-08-2002 (umur 18 tahun 9 bulan)
NIK	:	XXXXXXXXXX
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
No Hp	:	0857-7729-3609
Tempat tinggal	:	XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes

dengan calon suaminya :

N a m a	:	XXXXXXXXXX
Tempat,tanggal,lahir	:	Brebes, 21-06-1997 ( umur 24 tahun)
NIK	:	XXXXXXXXXX
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
No Hp	:	-
Alamat	:	XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Mei 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertunangan pada 3(tiga) tahun yang lalu, antara anak Pemohon dan calon suami anak pemohon belum pernah berhubungan badan serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2021 sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami atau kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.4.000.000,-- (Empat Juta Rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan Jejaka yang bernama (XXXXXXXXXX);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXXXX serta

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tanggal 11 Maret 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tanggal 03 Maret 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon tanggal 11 Januari 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3329172602074212 tanggal 06 Juli 2017, atas nama Deni Sukmawan, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto Kopi Kutipan akta nikah atas nama Deni Sukmawan tanggal 3 Oktober 2001 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Mei 2021, (bukti P-6).
7. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXXXX tanggal 11 Januari 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pondok Pinang 09 Pagi Jakarta Selatan atas nama XXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2014, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Surat pernyataan XXXXXXXXXX belum pernah menikah tertanggal 22 Mei

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah bermeterai cukup ( bukti – 9);

10. Surat Keterangan dokter Puskesmas Banjarharjo atas nama XXXXXXXXXX , telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P-10);
11. Surat Keterangan Dokter Puskesmas Banjarharjo atas nama M XXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Penduduk calon menantu Pemohon tanggal 25 Pebruari 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Foto copy Surat keterangan pernah sekolah atas nama XXXXXXXXXX tanggal 27 Mei 2012 , telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXXXX dari Desa Parereja Kecamatan banjarharjo Kabupaten Brebes tanggal 24 Mei 2021 ,telah bermeterai cukup ( bukti P-14);
15. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Laki laki Pemohon tanggal 03 Nopember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Perempuan Pemohon tanggal 03 Nopember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon No.3329172602075310 tanggal 20 Nopember 2015, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
19. Foto Kopi Kutipan akta nikah atas nama Rawan Al rasto tanggal 10 Mei 2006 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXXXXXXX , umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon II;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX cukup lama, bahkan sudah tunangan tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedang XXXXXXXXXX, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal 4.000.000;-; (Empatjuta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II XXXXXXXXXX , umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX cukup lama, bahkan sudah tunangan tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa XXXXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedang XXXXXXXXXX, agama Islam, dan telah mempunyai

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal 4.000.000;- (Empatjuta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim agar memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Para Pemohon sebagai Orangtua kandung calon mempelai wanita yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar menunda rencananya menikahkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 19 bukti tertulis ( P-1 sampai dengan P-19) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1.XXXXXXXXXX 2, Candra Setiawan bin Nata Disastra;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPERdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo Undang-Undang No.10 tahun 2020), sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX , (umur 18 tahun 9 bulan), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, (umur 24 tahun), namun keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-6) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun, (bukti P-3, P-4, dan P-7);

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan ,anak Pemohon sudah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu , sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXX ) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXXXX) berstatus jejaka (bukti P-14), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXX) statusnya masih gadis (P.9) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXXXX) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah );
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXX ) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

### تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan laki laki yang bernama (XXXXXXXXXX);-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi Bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqad'ah 1442 Hijriyah Oleh Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., sebagai Hakim tunggal, dibantu Maslamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Maslamah, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan I dan II	:	Rp	200.000,-
Biaya PNBP Panggilan I ,	:	Rp	20.000,-
II			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	345.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 287/Pdt.P/2021/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)